

MODEL KESESUAIAN IMPLEMENTASI PROGRAM JUT DAN JAPRO DALAM PENINGKATAN SEKTOR PERTANIAN DI KOTA BATU

Maulidina Ainur Rosida¹, Afifuddin², Hirshi Anadza³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: ainurmaulidina@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya isu atau fenomena tentang menurunnya sektor pertanian di Kota Batu pada tahun 2015-2017 dan lemahnya infrastruktur baik fisik dan non fisik dalam sektor pertanian. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pertanian mengeluarkan kebijakan publik bentuk program JUT dan Japro untuk menunjang dan memperlancar kegiatan dibidang pertanian dalam bentuk infrastruktur berupa jalan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model implementasi program JUT dan japro dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu beserta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara model implementasi program JUT dan Japro dengan teori Model Kesesuaian Implementasi Program David C. Korten, yakni adanya kesesuaian ketiga elemen tersebut yang diantaranya Program JUT dan Japro, Dinas Pertanian, dan petani/ gapoktan/ masyarakat sama-sama saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Faktor pendukung dalam implementasi JUT dan Japro di Kota Batu ialah adanya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang berbentuk gotong royong, tenaga, hingga adanya dana hibah berupa lahan dan adanya usulan dari masyarakat khususnya kelompok tani untuk dibuatkan jalan pertanian guna memperlancar kegiatan usaha tani mereka. Sedangkan, faktor penghambatnya ialah adanya institusi lain yang ikut berperan dalam pembangunan infrastruktur bentuk jalan, sehingga membuat perkembangan program JUT dan Japro menurun dari segi kuantitas.

Kata kunci : JUT, Japro, implementasi program, model kesesuaian implementasi David C. Korten

Pendahuluan

Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) yang biasanya dikenal sebagai jalan pertanian merupakan salah satu jenis infrastruktur yang dibutuhkan dalam sektor pertanian khususnya dalam mendukung kegiatan agribisnis (Daulay, 2019). Program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) adalah bentuk dari kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan prasarana transportasi di kawasan pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) yang berfungsi untuk memperlancar pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju ke tempat penampungan, tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan, pemukiman, ataupun pasar

Di Indonesia, prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian disebutkan dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang bertanggungjawab untuk menyediakan atau mengelola prasarana pertanian ialah Pemerintah dan Daerah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pemerintah Pusat dan Daerah juga berperan untuk membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas.

Adapun masalah yang ingin peneliti jadikan fokus dan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah analisis kebijakan publik atas masalah sarana produksi (saprodi) dan lemahnya infrastruktur baik fisik maupun non fisik pada sektor pertanian di Kota Batu, maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Batu mengeluarkan kebijakan publik untuk peningkatan sektor pertanian di Kota

Batu dengan mencanangkan Program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro). Program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) merupakan program kegiatan pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian untuk menunjang dan memperlancar kegiatan dibidang pertanian, seperti halnya sarana produksi, alat angkut hasil panen pertanian, baik tanaman pangan maupun hortikultura yang ada di Kota Batu.

Menurut Nonci (2017:19) untuk mengimplementasikan suatu program diperlukan suatu pendekatan manajemen supaya program dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur guna mencapai sasaran dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, untuk menganalisis model implementasi program JUT dan Japro dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu, peneliti menemukan bahwa tahun 2018 sebagian besar tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan produksi yang cukup tinggi dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada tanaman padi, jagung, jeruk dan mawar. Hal ini sesuai dengan data yang peneliti sediakan dengan mengambil beberapa sample tanaman hortikultura yang banyak diusahakan di Kota Batu yakni buah apel, buah jeruk dan bunga mawar, dan untuk tanaman pangan ialah padi, jagung, dan ubi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan mengkaji salah satu program hasil dari kebijakan publik dengan judul : “Model Kesesuaian Implementasi Program JUT dan Japro dalam Peningkatan Sektor Pertanian Kota Batu”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti, yakni:

1. Bagaimana model kesesuaian implementasi program JUT dan Japro dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program JUT dan Japro dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan tujuan dari penelitian ini diantaranya ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana model kesesuaian implementasi program JUT dan Japro dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor program JUT dan Japro, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam upaya meningkatkan sektor pertanian di Kota Batu.

Kajian Teori

Kebijakan Sebagai Program

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Hugwood & Gunn (dalam Hayat, 2018:15) berpendapat bahwa kebijakan publik itu terdiri dari sepuluh definisi, salah satunya ialah kebijakan sebagai program. Dijelaskan bahwa program-program merupakan bagian dari kebijakan publik. Setiap yang dilakukan oleh pemerintah baik program yang bersifat maupun nonformal dapat dianggap sebagai kebijakan. Program kerja tersebut dihasilkan dari rencana kerja yang merupakan bentuk kinerja pemerintah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan untuk kepentingan masyarakat guna membangun dalam sinergi tata kelola yang baik.

Implementasi Program

Menurut Nonci (2017:19) untuk mengimplementasikan suatu program diperlukan suatu pendekatan manajemen supaya program dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur guna mencapai sasaran dengan efektif dan efisien. Bisa dikatakan bahwa peran manajemen penting pada pengimplementasian suatu program yang mempunyai fungsi yang terkait satu sama lain yakni fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, fungsi monitoring dan evaluasi.

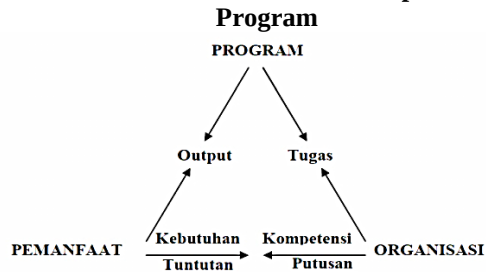
Program merupakan program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi (Siagan, 2006:116). Adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program merupakan unsur kedua dari pelaksanaan program dengan melibatkan masyarakat untuk menilai apakah program tersebut membawa hasil perubahan atau peningkatan dalam kehidupan. Sedangkan untuk unsur ketiga ialah peran dari implementor itu sendiri dalam mengimplementasikan program.

Model Kesesuaian Implementasi Program David C. Korten

Model implementasi program dari David C. Korten (dalam Akib dan Tarigan 2008:12) menggunakan pendekatan proses pembelajaran yang dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Adapun gambar model implementasi kebijakan yang

dikembangkan oleh David C Korten adalah sebagai berikut :

Gambar. 1 : Model Kesesuaian Implementasi



Sumber : David C. Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008:12)

Dapat dilihat bahwa model kesesuaian implementasi program David C. Korten mempunyai tiga elemen penting yakni program itu sendiri, organisasi (pelaksana program), dan kelompok sasaran program. Adanya kesesuaian dari tiga elemen tersebut mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program. Pertama, kesesuaian program dengan organisasi, yaitu kesesuaian antara tugas akan isi program tersebut dengan kemampuan organisasi sebagai pelaksana. Kedua, kesesuaian antara program dan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang akan ditawarkan oleh program tersebut melalui apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Sedangkan yang ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana (implementor) yaitu kesesuaian yang berkaitan dengan syarat yang diputuskan oleh organisasi atau aparat guna memperoleh hasil program dengan apa yang dilakukan oleh sasaran program.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Hybert Hyman (dalam Koentjaraningrat, 1991:29) mendefinisikan jenis penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. Sedangkan, metode kualitatif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:3) menyatakan bahwa metode kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Fokus Penelitian

1. Model kesesuaian implementasi Program Jalan Usaha Tani (JUT) Dan Jalan Produksi (Japro) Dalam Peningkatan Sektor Pertanian Di Kota Batu, sesuai dengan indikator Model Kesesuaian Implementasi Program David C. Korten
 - a. Program JUT dan Japro
 - b. Organisasi (Pelaksana Program)
 - c. Pemanfaat (Sasaran program)
2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Jalan Usaha Tani (JUT) Dan Jalan Produksi (Japro) Dalam Peningkatan Sektor Pertanian Di Kota Batu
 - a. Faktor pendukung yang dihadapi dalam implementasi program JUT –Japro
 - b. Faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi program JUT – Japro

Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi yang diambil dari penelitian ini adalah di Kota Batu. Sedangkan situs penelitian merupakan letak dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat serta benar-benar diperlukan dalam penelitian dan situs penelitiannya adalah pada Dinas Pertanian Kota Batu.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pegawai pada Dinas Pertanian Kota Batu, khususnya kepada penanggungjawab program JUT dan Japro yakni yang bertugas pada Dinas Pertanian dan Kelompok Tani selaku sasaran dari program tersebut.
2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka seperti buku, penelitian, gambar, arsip, tabel, artikel, serta catatan-catatan dari pihak yang terkait lainnya

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adapun sumber data dalam penelitian ini, penulis akan melakukan proses wawancara di Dinas Pertanian Kota Batu terhadap penanggungjawab program JUT (Jalan Usaha Tani) dan Japro (Jalan Produksi) yakni oleh Bapak Agus Trisnobuwono, S.Hut selaku Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pembiayaan, Bapak Slamet Nur Hasan, SP selaku Seksi Lahan, Irigasi dan Konversi serta Bapak Hadi Sutrisno, SE selaku Kepala Dusun

Banaran Desa Bumiaji serta Ketua Kelompok Tani Bumiaji Sejahtera 1

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis segala hal berkaitan dengan lingkungan yang akan diteliti. Maka dari itu, metode observasi bisa digunakan dan dilakukan untuk melihat dan mengamati objek secara langsung ke Dinas Pertanian Kota Batu.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data-data teoritis yang berhubungan dengan tema penelitian melalui buku, jurnal, hingga catatan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) khususnya pada Dinas Pertanian di Kota Batu.

Instrument Penelitian

Adapun instrumen dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dalam memperoleh data serta informasi dalam penelitian ini sebagai berikut : (a) Peneliti sendiri, yakni dengan melakukan observasi dengan lingkungan atau instansi terkait dengan melakukan wawancara beserta dokumentasi terhadap objek yang diteliti. (b) Pedoman wawancara, yakni dengan menyiapkan pertanyaan tertulis yang disusun dengan secara terstruktur untuk mendapatkan data yang akurat berupa tanggapan atau respon terhadap masalah atau fenomena yang diteliti. (c). Catatan lapangan, yakni digunakan sebagai alat atau saran bagi peneliti untuk mencatat seluruh informasi terkait sesuai hasil observasi dan pengamatan yang diperoleh peneliti selama proses berlangsungnya penelitian di lapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kualitatif, karena teknis analisis data ini diperoleh dari proses membaca, mempelajari dan menelaah data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh ini kemudian dilanjutkan analisis dengan mengikuti langkah-langkah sebagaimana disarankan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2005) bahwa dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup 3 tahap yakni:

1. Reduksi data

Pada proses pengumpulan data akan terkumpul banyak dan semakin kompleks. Maka dari itu, dengan tahap reduksi data ini digunakan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, merangkum, dan memfaktorkan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian data

Pada proses penyajian data ini merupakan proses penyusunan sekumpulan informasi digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data yang diteliti

3. Kesimpulan atau Vertifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada proses penarikan kesimpulan ini dilakukan guna mencari tema, pola, hubungan, fenomena yang terjadi dan data-data yang diperoleh kemudian ditinjau ulang untuk mendapatkan data yang valid

Petani/Gapokta/
Masyarakat

Teknik Keabsahan Data

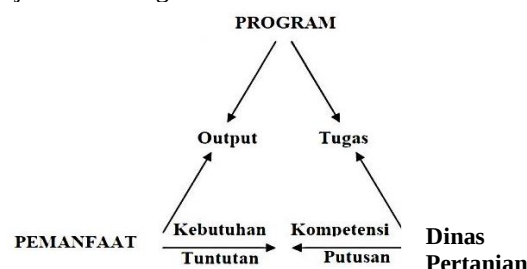
Moloeng, (2011:324) mengatakan bahwa untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang berdasarkan dengan beberapa teknik pemeriksaan kriteria tertentu. Adapun 4 teknik pemeriksaan yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, yakni:

1. Kepercayaan (credibility)
2. Keteralihan (transferability)
3. Ketergantungan (dependability)
4. Kepastian (Confirmability)

Pembahasan

Model Kesesuaian Implementasi Program JUT dan Japro dalam Peningkatan Sektor Pertanian di Kota Batu

Pada hasil penelitian diatas, ditemukan bahwa model implementasi program JUT dan Japro peneliti melihat kesamaan antara teori yang ada yakni Model Kesesuaian Implementasi Program David C. Korten. Adanya kesesuaian ketiga elemen tersebut yang diantaranya Program JUT dan Japro, Dinas Pertanian, dan petani/ gapoktan/ masyarakat sama-sama saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4.3 Model Kesesuaian Implementasi Program JUT dan Japro

Sumber : data yang diolah peneliti, 2020 (bereferensi dari model kesesuaian implementasi program David C. Korten)

Pertama, kesesuaian program JUT dan Japro dengan Dinas Pertanian yaitu kesesuaian antara tugas akan isi program tersebut dengan kemampuan Dinas Pertanian sebagai pelaksana. Berbicara mengenai isi program secara teknis Dinas Pertanian berpedoman dengan Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha Tani 2018 oleh Kementan. Adapun indikator-indikator dalam implementasi program JUT dan Japro di Kota batu ialah dengan memperhatikan standar teknis, kriteria lokasi, tahap pelaksanaan, metode pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Standar teknis sendiri sudah dijelaskan secara rinci dalam Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha Tani 2018 oleh Kementerian Pertanian bahwa untuk pembangunan jalan usaha tani utama berdimensi lebar atas antara 1-3 meter dan lebar bawah 2-4 meter atau minimal dapat dilalui kendaraan beroda tiga dan tinggi jalan sekitar 0,25-0,75, sedangkan untuk komponen (badan jalan, bahu jalan, gorong-gorong dan sebagainya) menyesuaikan dengan kebutuhan. Namun dari hasil penelitian untuk standar teknis program JUT dan Japro di Kota Batu juga berpedoman dari Kementan, dapat dilihat dari tabel 4.2 Kegiatan Reguler JUT dan Japro Tahun 2018, dimensi yang digunakan sesuai dengan teori yang ada yakni lebar 2-4 m. Sedangkan komponennya hanya memperhatikan pengerjaan penguat jalan atau bahu jalan dengan dimensi lebar 0,3 m dan tinggi 0,5-140 m dengan menyesuaikan kondisi jalan.
- b. Kriteria lokasi yang dapat disentuh oleh program JUT sudah dijelaskan secara rinci di dalam Pedoman Teknis dari Kementan dari jenis areal persawahan yang termasuk sentra produksi pangan, luas hamparan minimal 15 ha, hingga peran petani dan kelompok tani. Sedangkan dalam program JUT-Japro di Kota Batu dari skala teknis masih sama tetapi untuk penentuan lokasi JUT-Japro ada sedikit perbedaan yakni dari areal persawahan yang dituju dan proses penentuan lokasi. Untuk JUT merupakan program pembangunan jalan yang ditujukan ke areal persawahan jenis tanaman pangan, sedangkan Japro untuk areal persawahan hortikultura. Adapun perbedaan disini ialah dikarenakan banyaknya petani komoditas hortikultura dibanding tanaman pangan, maka dari itu secara kriteria lokasi Dinas Pertanian menggunakan dua jenis pendekatan yakni JUT dan Japro.
- c. Tahap pelaksanaan yang dijelaskan dalam pedoman Kementan tahap ini terdiri dari identifikasi calon lokasi dan survei, investigasi, desain dan penyusunan anggaran. Secara teknis implementasi program JUT dan Japro dalam tahap pelaksanaan sama dengan pedoman

Kementan, namun ada sedikit perbedaan dari aspek identifikasi calon lokasi dan penyusunan anggaran. Keduanya merupakan unsur yang dilakukan dalam tahap perencanaan yang dilaksanakan T-1, namun dalam tahap identifikasi calon lokasi Kota Batu menggunakan 3 jalur atau sumber yakni, dari usulan para petani, pokok pikiran dewan dan penilai dari profesi teknis. Sedangkan untuk penyediaan anggaran dilakukan pembayaran 100% dibelakang kepada penyedia, dikarenakan Kota Batu menggunakan penyedia atau pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan.

- d. Metode pelaksanaan ini merupakan kegiatan perencanaan diatas sudah dilakukan dari identifikasi CPCL hingga persiapan anggaran. Namun dalam pelaksanaan program JUT dan Japro di Kota Batu pada tahun 2018 semua dilakukan melalui penyedia atau pihak ketiga, bukan dari swakelola yang dilakukan oleh petani dan gapoktan.
- e. Monitoring dan evaluasi program JUT dan Japro dalam pedoman Kementan dilaksanakan pada persiapan dan pelaksanaan konstruksi oleh Dinas Pertanian dan konsultan, sedangkan di Kota Batu juga hampir sama dikarenakan yang bertanggung jawab melakukan monitoring atau pengawasan ialah Dinas Pertanian dan Konsultan Daerah. Ada sedikit perbedaan dari segi teknis monitoring dan evaluasi program JUT dan Japro di Kota Batu yakni Dinas Pertanian Kota Batu melakukan minimal 3 tahap monitoring dan evaluasi dalam implementasi program JUT dan Japro. Pertama pada waktu perencanaan T-1, kedua pada waktu tahap persiapan yang dilakukan untuk mengecek secara langsung apakah kondisi jalan yang akan dibangun sesuai data yang didapat pada perencanaan atau perlu perubahan, dan ketiga pada waktu proses pelaksanaan atau pembangunan konstruksi untuk melihat apakah sesuai dengan data pada waktu survei identifikasi calon lokasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir masalah jika terdapat perubahan kondisi lahan yang akan dibangun, agar penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan waktu singkat.

Sedangkan, kesesuaian antara program JUT dan Japro dan pemanfaat (Petani, Gapoktan, Masyarakat) yaitu kesesuaian antara apa yang akan ditawarkan oleh program tersebut melalui apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Berbicara mengenai output program JUT dan Japro mempunyai fungsi utama untuk memperlancar kegiatan agribisnis baik pada saat pengangkutan distribusi sarana-prasarana pertanian ke lahan pertanian maupun memperlancar pengangkutan hasil pertanian ketempat lain.

Kedua, kesesuaian antara Dinas Pertanian dengan program JUT dan Japro ialah kemampuan Dinas Pertanian Kota Batu sebagai pelaksana dengan isi program tersebut. Berbicara mengenai kemampuan Dinas Pertanian dalam mengimplementasikan Program JUT-Japro dapat dilihat dari peran dinas pertanian dalam usaha mengembangkan pembangunan jalan pertanian, dimana setiap tahunnya semakin berkurang dikarenakan banyaknya lahan yang sudah disentuh oleh program tersebut. Sedangkan, kesesuaian antara Dinas Pertanian (organisasi pelaksana) dengan pemanfaat yaitu kesesuaian yang berkaitan dengan syarat yang diputuskan oleh organisasi atau aparat guna memperoleh hasil program dengan apa yang dilakukan oleh sasaran program. Adapun syarat yang ditekankan oleh Dinas Pertanian, khususnya untuk para petani atau kelompok tani yang ingin mengusulkan pembangunan JUT maupun Japro yakni, jalan yang diusulkan minimal berlebar 2 m. Selain itu, dalam pengusulan pembangunan JUT-Japro dari kelompok tani harus sudah diakomodir dari proses musrembang desa, kecamatan dan kota.

Ketiga, kesesuaian antara pemanfaat (Petani, Gapoktan, Masyarakat) dan Dinas Pertanian ialah adanya tuntutan dan kebutuhan atau dorongan dari masyarakat untuk memperoleh hasil program tersebut. Tuntutan dan kebutuhan program JUT dan Japro ini bersumber dari tiga jalur antara lain dari usulan para petani sendiri, pokir atau pokok pikiran dari Dewan, dan dari penilaian profesi teknis. Namun, tuntutan dari pemanfaat berbentuk usulan dari kelompok tani/gabungan kelompok tani yang mana standar teknis hingga kriteria lokasi melalui proses musrembang berdasarkan ketentuan dari Dinas Pertanian. Sedangkan, kesesuaian antara Pemanfaat (Petani/ Kelompok Tani/ Masyarakat) dengan Program JUT-Japro ialah adanya kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan pemanfaat. Adapun hasil program yang dirasakan oleh pemanfaat (Petani/ Kelompok Tani/ Masyarakat) ialah mempermudah aksesibilitas usaha tani dan diharapkan berdampak pada peningkatan sektor pertanian di Kota Batu.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Pada Implementasi Program JUT dan Japro dalam Peningkatan Sektor Pertanian

Pada proses Implementasi program kebijakan pastinya membutuhkan berbagai faktor pendukung. Selain faktor pendukung, tidak dapat dipungkiri bahwa ada faktor penghambat yang dihadapi dalam melaksanakan program tersebut. Sementara itu, faktor pendukung implementasi program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu adalah partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang berbentuk gotong royong, tenaga, hingga adanya dana hibah berupa lahan jika terdapat pelebaran jalan guna memenuhi standar teknis.

Sedangkan, kesadaran masyarakat berbentuk dalam wujud usulan dari masyarakat khususnya para petani, kelompok tani untuk dibuatkan jalan pertanian guna memperlancar kegiatan usaha tani mereka. Adapun usulan itu dilakukan dengan cara musrembang terlebih dahulu, kemudian pihak desa dapat mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian. Selain itu, dalam pengusulan yang dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok tani harus memenuhi syarat dan ketentuan dari Dinas Pertanian perihal kriteria lokasi baik spesifikasi hingga dimensinya. Sementara itu, faktor penghambat program JUT dan Japro ialah dikarenakan hampir tidak adanya lahan yang tersedia lagi untuk dijadikan program JUT dan Japro. Permasalahan tersebut muncul akibat banyaknya pariwisata di Kota Batu dari tahun ke tahun, banyaknya pembangunan perumahan atau PUPR yang masuk kelahan pertanian, dan tersedianya anggaran desa. Sehingga hal ini menjadikan itu semua sebagai faktor penghambat karena berakibat pada menurunnya perkembangan pembangunan infrastruktur melalui JUT dan Japro dari segi kualitas atau jumlahnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peran Dinas Pertanian terhadap implementasi program JUT dan Japro di Kota Batu sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya titik jalan yang sudah tersentuh program JUT dan Japro sehingga pelaksanaan program pembangunan JUT dan Japro dari tahun ketahun makin berkurang.
2. Terdapat kesamaan antara model implementasi program JUT dan Japro dengan teori Model Kesesuaian Implementasi Program David C. Korten, yakni adanya kesesuaian ketiga elemen tersebut yang diantaranya Program JUT dan Japro, Dinas Pertanian, dan petani/ gapoktan/ masyarakat sama-sama saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut.
3. Faktor Pendukung implementasi program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) dalam peningkatan sektor pertanian di Kota Batu adalah partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat. Partisipasi masyarakat yang berbentuk gotong royong, tenaga, hingga adanya dana hibah berupa lahan jika terdapat pelebaran jalan guna memenuhi standar teknis. Sedangkan, kesadaran masyarakat berbentuk dalam wujud

usulan dari masyarakat khususnya para petani, kelompok tani untuk dibuatkan jalan pertanian guna memperlancar kegiatan usaha tani mereka.

4. Faktor Penghambat implementasi program JUT dan Japro ialah dikarenakan hampir tidak adanya lahan yang tersedia lagi untuk dijadikan program JUT dan Japro. Permasalahan tersebut muncul akibat banyaknya pariwisata di Kota Batu dari tahun ke tahun, banyaknya pembangunan perumahan atau PUPR yang masuk kelahan pertanian, dan tersedianya anggaran desa yang menjadikan perkembangan program JUT dan Japro menurun dari segi kuantitas (jumlah).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa sebuah implementasi suatu kebijakan publik khususnya dalam program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro) harus dilakukan sebaik dan seoptimal mungkin, guna memenuhi sasaran program yakni menyediakan kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Penyampaian informasi kebijakan kepada masyarakat (kelompok target) oleh Pemerintah terkait (Dinas Pertanian Kota Batu) perlu ditingkatkan baik frekuensi maupun jangkauannya.
2. Koordinasi antara komisi pengawas dan komisi pelaksana perlu ditingkatkan lagi, agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik. Selain itu koordinasi antara kelompok masyarakat hingga desa juga perlu untuk mengetahui kondisi lokasi yang akan dibangun terdapat perubahan atau tidak, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pertanian untuk melanjutkan ketahap pelaksanaan.
3. Masyarakat harus lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan baik dalam organisasi maupun perkumpulan yang diadakan oleh pihak pemerintah agar lebih paham secara luas tentang adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah khususnya Kota Batu.
4. Masyarakat harus lebih ditingkatkan kesadarannya tentang akan kebutuhan mereka dan mengetahui apa saja output serta manfaat yang akan didapat dari adanya kebijakan publik ini, khususnya program Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi di Kota Batu.
5. Perlu adanya penelitian lanjutan, penelitian ini masih didasarkan pada hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan dengan waktu yang terbatas sehingga masih terdapat kelemahan. Untuk peneliti selanjutnya dianjurkan untuk melihat implementasi secara lebih komprehensif

dan teliti mengenai pelaksanaan program Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (Japro).

Daftar Pustaka

- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukuran. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Batu, D. P. (2018). LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun Anggaran 2018. Kota Batu.
- Hadiutomo, K. (2019). MEMBANGUN KAWASAN PERSWAHAN PADI MODERN "Solusi Ketahanan Pangan Ke Depan". Bogor: IPB Press.
- Hartati, S., & Nurdin, I. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Koentjaraningrat. (1991). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pertanian Kota Batu Tahun Anggaran 2018
- Manila, I. (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moloeng, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Moloeng, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nonci, N. (2017). *Impelementasi Program Gemas Kakao: Studi Kebijakan Program Gemas Kakao Kabupaten Luwu*. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Pertanian TA.2013, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, DIRJEN Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian, 2013
- Robert, R. (1984). *Rancangan Kebijakan Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Rohman, A. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatam.
- Siagan, S. (2006). *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Statistika Daerah Kota Batu 2015
- Statistika Daerah Kota Batu 2016
- Statistika Daerah Kota Batu 2017
- Statistika Daerah Kota Batu 2018
- Statistika Daerah Kota Batu 2019

- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, & Arikunto. (1996). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek (Implementasi Kebijakan Pangan Kabupaten Rembang). Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Suryana. (2009). Pengaruh Corporate Governance Asset dan Growth terhadap Kinerja Pasar. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Daulay, A. R. (2019). Analisis Kriteria dan Bobot Untuk Penentuan Lokasi Jalan Pertanian di Provinsi Jambi. TEKNOTAN, Vol 13. No 1.
- Suminar, R. E. (2018). Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) Pada Kawasan Pertanian di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Plano Madani, Volume 7 Nomor 1 hal 81-88.
- Rusmantika, K. (2017). Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Tentang Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Kalimendong Kabupaten Wonosobo. Skripsi : Universitas Diponegoro.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batu Tahun 2017-2022

UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Sumber Internet:

Badan Pusat Statistik Kota Batu,
<https://batukota.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 08 Oktober 2020)

Dinas Pertanian Kota Batu kembangkan JUT dan Japro, times indonesia, 2019, Muhammad Dhani Rahman,
<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/218761/dinas-pertanian-kota-batu-kembangkan-jut-dan-japro> (diakses pada tanggal 07 Oktober 2020)

Perlancar Akses Jalan Pertanian di Kota Batu, Pemkot Programkan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi, Irsya Richa, 2019, malangtimes.com
<https://www.malangtimes.com/baca/41668/20190715/194100/perlancar-akses-jalan-pertanian-di-kota-batu-pemkot-programkan-jalan-usaha-tani-dan-jalan-produksi> (diakses pada tanggal 08 Oktober 2020)
Sukseskan 5 Program, 2020 Pertanian Kota Batu Digelontor Rp 20 Miliar, Irsya Richa, malangtimes.com

<https://www.malangtimes.com/baca/48359/20200125/123200/sukseskan-5-program-2020-pertanian-kota-batu-digelontor-rp-20-miliar> (diakses pada tanggal 07 Oktober 2020)

Tahun ini, Kementan Bangun Jalan Usaha Tani di 10 Provinsi, suara.com, Fabiola Febrinastri, 2020
<https://www.suara.com/bisnis/2020/04/04/133330/tahun-ini-kementan-bangun-jalan-usaha-tani-di-10-provinsi?page=all> (diakses pada tanggal 08 Oktober 2020)